



**PENGUMUMAN**  
**LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA**  
(Tanggall Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 1 Februari 2023/Periodik - 2022)

**BIDANG** : EKSEKUTIF  
**LEMBAGA** : PEMERINTAH KABUPATEN TEMANGGUNG  
**UNIT KERJA** : INSPEKTORAT DAERAH

**I. DATA PRIBADI**

1. Nama : HADI KHOIRUDIN
2. Jabatan : FUNGSIONAL AUDITOR
3. NHK : 774698

**II. DATA HARTA****A. TANAH DAN BANGUNAN**

Rp. 1.350.000.000

1. Tanah dan Bangunan Seluas 390 m2/90 m2 di KAB / KOTA TEMANGGUNG, WARISAN Rp. 500.000.000
2. Tanah Seluas 173 m2 di KAB / KOTA TEMANGGUNG, HASIL SENDIRI Rp. 50.000.000
3. Tanah Seluas 3545 m2 di KAB / KOTA TEMANGGUNG, HASIL SENDIRI Rp. 700.000.000
4. Tanah dan Bangunan Seluas 268 m2/60 m2 di KAB / KOTA TEMANGGUNG, HASIL SENDIRI Rp. 100.000.000

**B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN**

Rp. 63.500.000

1. MOBIL, MITSUBISHI SEDAN Tahun 1994, HASIL SENDIRI Rp. 45.000.000
2. MOTOR, VESPA PS Tahun 1980, HASIL SENDIRI Rp. 8.500.000
3. MOTOR, HONDA BEAT Tahun 2013, HASIL SENDIRI Rp. 10.000.000

**C. HARTA BERGERAK LAINNYA**

Rp. 9.200.000

**D. SURAT BERHARGA**

Rp. ---

**E. KAS DAN SETARA KAS**

Rp. 2.300.000

**F. HARTA LAINNYA**

Rp. ---

**Sub Total**

Rp. 1.425.000.000

**III. HUTANG**

Rp. 102.000.000

**IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III)**

Rp. 1.323.000.000

## Catatan:

1. Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari [elhkpn.kpk.go.id](http://elhkpn.kpk.go.id).



Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui [elhkpn.kpk.go.id](http://elhkpn.kpk.go.id), serta tidak dapat dijadikan dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
3. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.